

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka mempercepat proses pembangunan nasional, pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan responsibilitas terhadap pembangunan berbangsa dan bernegara, salah satunya pemberlakuan otonomi khusus. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan *political will* Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada rakyat Papua, dengan dasar pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama berintegrasi dengan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, mencapai kesejahteraan dan mewujudkan penegakan hukum dan belum sepenuhnya memenuhi rasa penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya orang asli Papua . Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua diperlukan adanya kebijakan khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun berlakunya otonomi khusus tersebut, jika dipandang dari aspek kejiwaan mengandung tiga pesan moral yaitu: (1) adanya keberpihakan kepada orang asli Papua; (2) pemberdayaan dan (3) perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua dari berbagai bentuk penyimpangan, yaitu kekerasan,

penganiayaan, penghinaan dan pembunuhan. Melalui pelaksanaan otonomi khusus diharapkan akan menghentikan semua bentuk pelanggaran hak-hak dasar, kekerasan dan konflik kemudian mengutamakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, adanya keadilan kedamaian, penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.

Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi otonomi khusus, banyak terjadi penyimpangan dari amanat pokok otonomi khusus. Akibatnya orang Papua masih merasa tetap tertinggal dalam kondisi yang dilematis, tidak lagi dapat menikmati hasil otonomi khusus itu. Hal ini dikarenakan belum nampaknya secara signifikan adanya kondisi kesejahteraan yang meningkat, iklim kedamaian yang belum kunjung tiba dan penghormatan terhadap hak-hak dasar, melainkan sebaliknya orang Papua belum merasakan kebaikan dan kedamaian yang diharapkannya dan hak-hak dasarnya oleh kebijakan pemerintah, yang selalu kontroversial, yang melahirkan konflik baru antara rakyat Papua dengan aparat keamanan sehingga selalu diwarnai kekerasan, pembunuhan dan penganiayaan yang muncul berulang kali. Dalam realita, juga terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat yang bertentangan dengan semangat otonomi khusus, yakni:

a. Politisasi Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP)

Langkah awal terjadinya pelanggaran terhadap amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 adalah karena tidak segera dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Pada hal sesuai

amanat Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2001, pemerintah menyelesaikan peraturan pemerintah tersebut selamat-lambatnya satu bulan setelah diterima usulan dari daerah dalam hal ini(gubernur). Usulan pembentukan MRP oleh Pemerintah Daerah sudah disampaikan 4 bulan setelah diberlakukannya UU Nomor 21 tahun 2001. Mundurnya penetapan peraturan pemerintah tentang pembentukan MRP dikarenakan adanya kecurigaan yang berlebihan atau politisasi keberadaan MRP dalam undang-undang otonomi khusus yang diasumsikan sebagai lembaga *super body* yang bisa mengintervensi dan memveto arah kebijakan pemerintah serta tujuan otonomi khusus ke arah perjuangan Papua merdeka. Pada hal fungsi tugas wewenang dan tujuan MRP sudah jelas diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 seperti termaktub pada Pasal 19,20,21,22,23,24,dan 25 ternyata tidak ada yang dikawatirkan sebagaimana diasumsikan itu. Politisasi keberadaan MRP tersebut masih berlanjut sampai dengan sekarang ini.

Akhirnya pemerintah berhasil mereduksi eksistensi MRP sebagai salah satu wujud kekhususan otonomi khusus Papua itu menjadi dua lembaga MRP di tanah Papua.

b. Dikeluarkannya Inpres Nomor.1 tahun 2003 tetntang Pengaktifan Kembali Provinsi Iran Jaya Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 pada tanggal 27 Januari 2003 Presiden RI Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Ipres Nomor 21 tahun 2003, yang isinya antara lain memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Papua dan para Bupati untuk mengambil langkah-langkah

percepatan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat berdasarkan Undang- Undang Nomor 45 tahun 1999 dan mengaktifkan pejabat gubernurnya. Pada hal Inpres Nomor 1 tahun 2003 akan berimplikasi buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Papua setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Secara politik administrasi UU Nomor 21 tahun 2001 melegitimasi keberadaan Propinsi Papua yang satu yang dulunya disebut Provinsi Irian Jaya, Sedangkan UU No 45 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 membagi Propinsi Irian Jaya waktu itu menjadi tiga Propinsi namun pembentukan tiga propinsi ini ditolak oleh rakyat Papua dan kemudian didukung oleh penetapan dalam sidang istimewa DPRD Propinsi Irian Jaya pada waktu itu.¹

Inpres nomor 1 tahun 2003 tersebut ditindaklanjuti oleh Mendagri melalui Radiogram berkualifikasi segera, Nomor 134/221/SJ, tertanggal 3 Februari 2003. Radiogram yang ditunjukkan kepada Gubernur Propinsi Papua, Bupati/ Walikota se Provinsi Papua, dan seluruh pejabat Eselon I Depdagri, berisikan 5 butir perintah. Inti dari ke 5 butir perintah adalah agar para pejabat yang ditunjuk segera mengambil langkah-langkah operasional pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2003, yang dilakukan sejalan dengan operasionalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tersebut adalah tindakan yang inkonsisten dan merupakan langkah awal merusaknya konstruksi jiwa Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.

¹ Paskalis Kossay. 2011 Konflik Papua, Akar Masalah dan Solusi, Penerbit Tollelegi, Jakarta.

Dikeluarkannya Inpres tersebut dapat membuyarkan semangat dan konsentrasi Pemerintah Daerah Papua dalam mempersiapkan diri untuk mengatur dalam segala instrumen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Akhirnya terjadi pro dan kontra yang cukup menyita waktu dan pikiran baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun di antara masyarakat Papua sendiri yang berujung pada *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi RI dimana dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UU No 45 Tahun 1999 yang melahirkan Propinsi Irian Jaya Barat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B. Ayat (1) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Di sisi lain Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mengakui realita politik yang ada di Provinsi Irian Jaya Barat yaitu telah adanya pemerintahan di sana. Orang Asli Papua menilai putusan MK tersebut, sebagai suatu tindakan pembohongan publik dan penghinaan. Berdasarkan logika hukum mestinya begitu dinyatakan UU Nomor 45 Tahun 1999 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka UU No. 45 Tahun 1999 tersebut gugur demi hukum dan secara otomatis gugur pula realita politik yang telah ada di dalamnya, oleh

karenanya Provinsi Irian Jaya Barat selama lima tahun tidak memiliki landasan hukum (UU) yang jelas. Propinsi ini eksis berjalan dengan berlandaskan pada Intruksi Presiden No 1 Tahun 2003, sampai pada akhirnya melalui negosiasi yang panjang, akhirnya Wakil Presiden Yusuf Kalla berhasil memfasilitasi pada pertemuan para pemimin Papua dan Irian Jaya Barat untuk membicarakan status hukum Provinsi Irian Jaya Barat di Jayapura. Melalui pertemuan tersebut disepakati status Provinsi Irian Jaya Barat masuk sebagai Provinsi Otonomi Khusus Papua, lalu keluarlah Perpu Nomor 1 Tahun 2008 ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang memasukkan status Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari wilayah otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat judul: Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua Melalui Amanah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 21 tahun 2001 disebutkan bahwa kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat judul: Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (DPRP) Dari Jatah Otonomi Khusus Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan mengikuti dan membaca sejumlah informasi mengenai polemik keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua jalur otonomi khusus

Papua maka perlu adanya kajian akademis yang konstruktif berdasarkan norma hukum positif sehingga hasilnya menjadi rekomendasi bagi para pengambil kebijakan. Dalam hal tersebut di atas penulis ingin memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian akademis sesuai dengan bidang studi ilmu hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui jatah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ?
2. Apa kendala-kendala yuridis proses pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari jatah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.?
3. Upaya untuk mengatasi hubungan-ubungan yuridis proses pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari jatah otonomi khusus bagi Provinsi Papua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua melalui jatah otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Untuk mengetahui kendala-kendala yuridis yang apa saja yang dihadapi mengenai pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari jatah Otonomi Khusus Papua setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari jatah otonomi khusus setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara, berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai lembaga negara yang di delegasikan demi keadilan dan demokrasi.

Secara praktis manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Papua sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai kewenangannya.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, sejauh penulis ketahui dan berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis belum menemukan tulisan secara khusus tentang tinjauan hukum terhadap pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua melalui amanah Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Penulisan ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum skripsi ini telah terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku. Secara umum sudah banyak yang menulis tentang otonomi khusus Papua, penulis mengambil 3 (tiga) sumber dari tesis yang ditulis oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. Sofia Bonsapia No.Mhs. : 07.1164/PS/MIH Pprogram Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2008.

Judul: Pelaksanaan tugas dan wewenang majelis rakyat papua menurut otonomi khusus Papua. Rumusan masalah: apakah Majelis Rakyat Papua sudah melaksanakan tugas dan Wewenangnya sesuai amanat otonomi khusus papua” . apakah kewenangan majelis rakyat papua menurut amanat otonomi khusus benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak Orang asli papua” faktor-faktor apa saja yang merupakan kendala atau hambatan Majelis Rakyat papua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua sesuai amanat otonomi khusus Papua” “Untuk mengetahui dan mengevaluasi perlindungan mrp terhadap hak-hak Dasar orang asli papua.” “Untuk mengetahui dan mengevaluasi faktor-faktor yang merupakan Kendala atau hambatan majelis rakyat papua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Hasil penelitian dan pembahasan tentang MRP sudah melaksanakan Tugas dan wewenangnya sesuai amanat otonomi khusus papua, Kewenangan MRP menurut otonomi khusus benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli papua dan Faktor-faktor yang merupakan kendala atau hambatan mrp dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. Fransiskus Xaverius Takerubun NPM 060509536 Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011.

Judul: Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire Sebagai Daerah Otonom Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Era Otonomi Khusus. Rumusan masalah: Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah kabupaten nabire dalam meningkatkan kesehatan masyarakat; Kendala yuridis apa yang dihadapi pemerintah kabupaten nabire dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah kabupaten nabire Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui kendala yuridis yang dihadapi pemerintah kabupaten nabire dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hasil penelitian: kabupaten/ kota merupakan satuan wilayah pemerintah yang rentang jaraknya relatif dekat dengan masyarakat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 59 ayat (2) uu no. 35 tahun 2008 tentang kabupaten nabire dalam meningkatkan kesehatan masyarakat perubahan atas uu no 21 tahun 2001, maka pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.²

3. Magdalena Maturbongs No. Mhs. 07.1165/PS/MIH Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2008.

² [www. Ejurnal, uajy.c.id](http://www.Ejurnal.uajy.c.id)

Judul: Pembagian Wewenang Antara Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Otonomi Khusus Papua. Rumusan Masalah: “Roblematika apa saja yang muncul dalam pembagian wewenang otonomi khusus antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota” “Bagaimana sistem pembagian wewenang secara konkret antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, teori pembagian wewenang apakah yang mengandung asas keadilan.

Tujuan penelitian: Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan mengevaluasi problematik apa saja yang muncul dari Pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/kota dengan adanya otonomi khusus. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pembagian wewenang secara Konkret antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk mengetahui dan mengevaluasi teori pembagian kewenangan yang mengandung asas keadilan.

Hasil Penelitian dan pembahasan yang terdiri atas sub bab-sub bab yaitu: Problematika pembagian wewenang antara pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota, sistem pembagian wewenang otonomi Khusus secara konkrit dan teori pembagian wewenang yang mengandung asas keadilan.

F. Batasan Konsep

1. Pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat³
2. Anggota adalah orang atau badan hukum yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu bagian.⁴
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
4. Jatah adalah hal atau kedudukan sebagai anggota
5. Otonomi Khusus adalah Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar
6. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara; peraturan yang dihasilkan legislatif yang tertinggi yang dibentuk bersama-sama oleh DPR dan Presiden; peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
7. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

³ Tim Redaksi Dendy Sugeno dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Cetakan ke 4, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, . Hlm 64, 68.

⁴

⁵Penjelasan umum Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau berfokus pada norma/ peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini digolongkan dalam penelitian hukum normatif, karena fokus dalam penelitian ini adalah norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang berupa :

- 1) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua yang memasukan status papua barat sebagai bagian dari wilayah otonomi khusus Papua dan Papua Barat.

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua MRP pada batang tubuh bagian keempat yang mengatur tentang pembentukan MRP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku dan pendapat hukum oleh para sarjana hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa:

- 1) Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- 2) Ateng Syarifudin, 1983, Pasang Surut Otonomi Daerah, Orasi Ilmiah UNPAR Bandung.
- 3) Basrowi Sudiki, Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro, insancendikia, Surabaya 2002, hal 1.
- 4) BAPPENAS. Analisis Indeks Fiskal Neto Tahun 2005 Dengan Dana Alokasi Khusus Alokasi Tahun 2007. <http://tkp2e-dak.org> diakses pada 6 Mei 2015.
- 5) Badan Pusat Statistik, (2000), Tingkat Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten (Penjelasan Ringkas), Jakarta.

- 6) Hamdani dan Sutarto, 2002, Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Solo Panepen Bukti
- 7) Kaho, Joseph Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 8) Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta : Erlanga.
- 9) Laporan tim 2001, otonomi pemberian negara kajian kritis atas otonomi daerah Yogyakarta Laper Pustaka Utama.
- 10) Muchamad Safa'at, 2001. Problem Otonomi Khusus Papua. Diakses: melalui <http://safaat.ub.ac.id/> pada tanggal 22 April 2015.
- 11) Manasse Malo dan Sri Trisnoningtias, Metode Penelitian Masyarakat, pusat antar universitas ilmu sosial Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 28.
- 12) M. Hadjon Philipus, et al., 1993, pengantar hukum administrasi Indonesia (introducing the Indonesian administrative law), Yogyakarta Gajah Mada University press.
- 13) Paskalis Kossay, Konflik Papua, akar masalah dan solusi, penerbit tollelegi, Jakarta, 2011.

c. Bahan hukum tersier

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit Gramedia Press, tanpa tahun penerbitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber Bapak Ignatius W. Mimin selaku kepala feraksi partai golongan karya (Golkar) di kantor Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua .

4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang dipergunakan adalah secara deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh dianalisis kemudian dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Proses penalaran di dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. SISTEMATIK PENULISAN /SKRIPSI

Sistematika penulisan hukum skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

Bab : I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Isi Penulisan Hukum Skripsi .

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai tiga bagian yaitu:

1. Bagaimana pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui jatah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
1. Apa kendala-kendala yuridis proses pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari jatah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2. Upaya untuk mengatasi hubungan-hubungan yuridis dalam pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari jatah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan atas apa yang sudah dibahas pada bab-baba sebelumnya, selain itu juga terdapat saran-saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan suatu gambaran atau pedoman bagi penulis-penulis lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan obyek penelitian yang sama.